
INTERAKSI EKONOMI ANTAR WILAYAH MENUJU KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEJAHTERA

Kandi Dwi Pratiwi¹

Direktorat Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik, Jl. Salemba Tengah
No.36, RT.2/RW.4, Paseban, Senen, Central Jakarta City, Jakarta,
Indonesia 10440

Abstrak

Perekonomian suatu wilayah dapat saling berhubungan dengan perekonomian wilayah lain melalui mekanisme perdagangan barang dan jasa. Pada kenyataannya, perubahan perekonomian tidak hanya berdampak untuk wilayah itu sendiri, tetapi juga berdampak pada wilayah lainnya. Suatu wilayah dapat mengimpor barang dan jasa dari wilayah lain untuk digunakan dalam proses produksi dan permintaan akhir, begitu pula sebaliknya. Hubungan saling ketergantungan tersebut menciptakan keterkaitan antar sektor dan antar wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis perekonomian Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan keterkaitan antar lapangan usaha dan keterkaitan antar provinsi menggunakan tabel Inter-Regional Input Output (IRIO). Hasil analisis menunjukkan bahwa lapangan usaha kunci di Kepulauan Bangka Belitung yaitu Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas, Industri Pengolahan, Transportasi dan Perdagangan, dan Konstruksi. Transaksi dalam wilayah Kepulauan Bangka Belitung lebih besar daripada transaksi antar wilayahnya. Lebih jauh, provinsi yang memperoleh dampak limpahan tinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Riau, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Kata kunci: *Keterkaitan, Sektor, Wilayah, IRIO*

¹ Direktorat Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik

PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian upaya dan proses perbaikan yang terencana, terpadu, bertahap, dan berkesinambungan dalam berbagai bidang. Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara optimal. Pembangunan tersebut tidak hanya dalam skala nasional, tetapi juga dalam skala regional/provinsi (BPS Provinsi Maluku & BAPPEDA Provinsi Maluku, 2015). Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau-pulau, yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Tipologi wilayah yang bervariasi ini menyebabkan proses pembangunan menjadi tidak mudah. Akibatnya, belum semua wilayah di tanah air merasakan adanya pemerataan pembangunan. Penduduk di wilayah timur Indonesia dan wilayah-wilayah perbatasan masih mengalami berbagai kendala aksesibilitas, baik akses terhadap pendidikan, kesehatan, komunikasi, maupun transportasi. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah tersebut akhirnya mengalami ketertinggalan pembangunan.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika persoalan ini akhirnya mendapatkan perhatian yang serius dari presiden Joko Widodo. Pada Sidang Tahunan DPR/MPR RI tahun 2017 yang lalu, Presiden telah menegaskan tentang pentingnya pembangunan yang merata di seluruh pelosok tanah air. Presiden berharap agar rakyat Indonesia yang berada di pinggir, perbatasan, dan pulau-pulau terdepan Indonesia, merasakan hadirnya negara dan merasakan adanya pembangunan. Hal ini berarti pembangunan harus merata di seluruh wilayah Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, di wilayah pulau jawa maupun luar jawa, dan wilayah ibu kota maupun wilayah perbatasan serta pulau-pulau terluar.

Akibat adanya ketidakmerataan pembangunan tersebut, sebagian besar penduduk Indonesia lebih banyak yang memilih tinggal di pulau Jawa. Data Sensus Penduduk Tahun 2020 memperlihatkan bahwa tidak kurang dari 50 persen penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa, dan hanya kurang dari 10 persen yang tinggal di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Selain itu, Pulau Jawa mampu tumbuh 7,88 persen, lebih tinggi

dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 7,07 persen (y-on-y). Tidak mengherankan jika akhirnya, lebih dari separuh PDB Indonesia juga bertumpu di pulau Jawa. Kondisi ini, sedikit banyak telah mendorong munculnya berbagai persoalan spasial, baik kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, maupun disparitas ekonomi.

1 Direktorat Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia, kandi.dwi@bps.go.id, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1780-6014>

Data pada Maret 2021 menunjukkan bahwa disparitas tingkat kemiskinan antar provinsi di Indonesia juga masih tinggi. Angka kemiskinan di kawasan barat Indonesia cenderung lebih rendah daripada di kawasan timur Indonesia. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri, persentase penduduk miskinnya sudah relatif rendah, yaitu 4,90 persen, di bawah persentase penduduk miskin secara nasional. Selain itu, ketimpangan ekonomi juga terjadi di wilayah desa dan kota. Angka gini ratio Indonesia pada Maret 2021 sebesar 0,384 dimana angka gini ratio di kota lebih tinggi dibandingkan di desa. Hal ini menjadi sinyal awal bahwa pemerataan pembangunan belum sepenuhnya tercipta, baik antar provinsi maupun antar wilayah desa dan kota.

Selain angka kemiskinan, keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah juga dapat diukur oleh pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2016, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 0,17 persen. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki nilai pertumbuhan ekonomi terendah ketiga di pulau Sumatera dan terendah kelima di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan Timur, Riau, Aceh, dan Kalimantan Utara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan perencanaan yang terintegrasi baik antar sektor (lapangan usaha) dan antar wilayah (provinsi), sehingga dapat mengoptimalkan hasil dari pembangunan ekonomi.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisis keterkaitan antar sektor dan angka pengangguran dalam suatu perekonomian. BPS Provinsi Maluku & BAPPEDA Provinsi Maluku (2015) menganalisis perekonomian

Provinsi Maluku menggunakan Tabel Input Output Provinsi Maluku 2013. Malba & Iqbal M Taher (2016) menganalisis Tabel Input Output atas dampak sektor pariwisata terhadap perekonomian Maluku untuk melihat keterkaitan ke depan dan ke belakang. Murbarani (2009) menganalisis keterkaitan pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap perekonomian Kota Palembang dengan menggunakan Tabel Input Output. Sementara itu, Amir & Nazara (2005) mengkaji perubahan struktur ekonomi dan kebijakan strategis pembangunan Jawa Timur tahun 1994 dan 2000 menggunakan analisis Input Output.

Selain itu, Luhur et al. (2014) pernah menganalisis konektivitas sektor kelautan dan perikanan dalam sistem Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dilakukan pada tahun 2014. Kajian dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa tabel Inter-Regional Input Output (IRIO) 2010 yang dimutakhirkan dari IRIO 2005 menggunakan metode row-augmented technical coefficient-sheet (RAS). Hasil kajian menunjukkan bahwa konektivitas sektor kelautan dan perikanan antar wilayah cenderung tinggi yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien keterkaitan ke belakang/indeks daya penyebaran dan koefisien keterkaitan ke depan/indeks daya kepekaan lebih besar dari satu satuan unit; tetapi konektivitas wilayah timur dengan wilayah barat masih rendah yang ditunjukkan oleh masih besarnya dominasi Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali dalam aktivitas ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Penelitian-penelitian yang disebutkan sebelumnya, sebagian besar hanya berfokus pada keterkaitan (linkage) antar sektor dalam perekonomian, sedangkan perubahan perekonomian tidak hanya berdampak untuk provinsi itu sendiri, tetapi juga berdampak pada provinsi lainnya. Terjadinya ekspor-impor barang dan jasa menciptakan suatu hubungan interaksi pada beberapa wilayah, terutama untuk wilayah kepulauan, seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepulauan Bangka Belitung dapat mengimpor barang dan jasa dari provinsi lain untuk digunakan dalam proses produksi dan permintaan akhir, di lain sisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengekspor barang dan jasa untuk kemudian digunakan oleh provinsi lain

sebagai input produksi atau permintaan akhir.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya berdasarkan linkage antar lapangan usaha, tetapi juga berdasarkan linkage antar provinsi. Analisis linkage antar provinsi tersebut dapat dilakukan melalui kerangka Inter-Regional Input Output (IRIO). Analisis perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan tabel IRIO belum banyak dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi baru bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan aspek keterkaitan antar sektor dan antar daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

METODE PENELITIAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan para perencana dan pengambil kebijakan pembangunan ekonomi nasional, maka perlu dilakukan penyusunan alat analisis yang komprehensif dalam menggambarkan aliran produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa secara spasial seperti tabel Inter-Regional Input Output (IRIO). Tabel IRIO merupakan pengembangan dari tabel Input-Output (IO). Tabel IRIO dapat menjelaskan keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah, sumber-sumber pertumbuhan baru antar wilayah, mengetahui efek limpahan (spillover effect) antar wilayah dan antar aktivitas ekonomi, serta sebagai bahan pendukung untuk perumusan kebijakan kewilayahan. Lebih jauh, tabel IO-IRIO dapat dimanfaatkan untuk berbagai perumusan kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan berbasis kewilayahan yang dapat mendukung perekonomian Kepulauan Bangka Belitung.

Matriks Pengganda

Misalkan z_{ij} adalah banyaknya output sektor i yang dialokasikan sebagai input antara pada sektor j , X_i adalah banyaknya output dari sektor i , dan F_i adalah jumlah permintaan akhir terhadap sektor i , maka total output dari sektor i dapat dituliskan sebagai berikut (Daryanto & Hafizrianda,

2010):

$$X_i = \sum_{j=1}^n z_{ij} + F_i \quad \dots\dots\dots(1)$$

Untuk menghitung matriks pengganda, tahap awal yang perlu dilakukan adalah menghitung koefisien input yang didefinisikan sebagai $a_{ij} = z_{ij}/X_j$ (BPS, 1999) maka persamaan (1) dapat diubah bentuknya menjadi:

$$X_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}X_j + F_i \quad \dots\dots\dots(2)$$

Dalam bentuk matriks dapat dituliskan sebagai berikut:

$$X = AX + F \quad \dots\dots\dots(3)$$

dengan

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad F = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

Matriks **A** disebut sebagai matriks teknologi. Dengan sedikit modifikasi, persamaan (3) dapat menghasilkan matriks pengganda output sebagai berikut:

$$(I - A)X = F$$

$$X = (I - A)^{-1}F \quad \dots\dots\dots(4)$$

$$X = BF$$

Rumusan tersebut mencerminkan pembentukan output (X) dipengaruhi oleh permintaan akhir (F). Penggunaan persamaan tersebut antara lain untuk menghitung porsi output yang terbentuk sebagai dampak dari masing-masing komponen permintaan akhir dan memperkirakan output

yang terbentuk akibat dampak permintaan akhir yang diproyeksikan. Matriks B adalah matriks pengganda output atau sering juga disebut sebagai matriks kebalikan Leontief. Elemen dari matriks kebalikan Leontief mencerminkan efek langsung dan efek tidak langsung dari perubahan permintaan akhir terhadap output sektor-sektor di dalam perekonomian. Matriks kebalikan Leontief banyak memberikan informasi tentang dampak keterkaitan antar sektor produksi, diantaranya keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan keterkaitan ke depan (forward linkage). Perubahan 1 unit di F_1 akan menimbulkan dampak perubahan X_1 sebesar b_{11} , terhadap X_2 sebesar b_{21} , dan seterusnya. Secara umum jumlah dampak akibat perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output seluruh sektor ekonomi adalah :

$$r_j = \sum_{i=1}^n b_{ij} \dots\dots\dots (5)$$

dengan b_j adalah jumlah dampak akibat perubahan permintaan akhir sektor j dan b_{ij} adalah dampak yang terjadi terhadap output sektor i akibat perubahan permintaan akhir sektor j . Pada sisi yang lain dapat juga dilihat bahwa dampak yang terjadi terhadap output X_1 sebagai akibat perubahan 1 unit F_1 sebesar b_{11} , sebagai akibat perubahan F_2 sebesar b_{12} , dan seterusnya. Sehingga, jumlah dampak terhadap output suatu sektor i sebagai akibat perubahan permintaan akhir berbagai (seluruh) sektor dapat dituliskan dalam bentuk persamaan:

$$s_i = \sum_{j=1}^n b_{ij} \dots\dots\dots (6)$$

dengan s_j adalah jumlah dampak terhadap sektor i sebagai akibat perubahan seluruh sektor dan b_{ij} adalah dampak yang terjadi terhadap output sektor i akibat perubahan permintaan akhir sektor j . Angka pengganda output menghitung efek perubahan output akibat

perubahan satu rupiah permintaan akhir (Nazara, 2005).

Keterkaitan Antar Sektor

Setiap sektor dalam perekonomian tidak berdiri sendiri karena saling terkait satu sama lain. Output dari suatu sektor merupakan input bagi sektor lainnya, begitu pula sebaliknya. Hubungan saling ketergantungan tersebut menciptakan keterkaitan antar sektor. Keterkaitan antar sektor dibagi menjadi dua bagian, yaitu keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan keterkaitan ke depan (forward linkage). Daya penyebaran merupakan ukuran untuk melihat keterkaitan ke belakang sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah, sedangkan derajat kepekaan untuk menjelaskan pembentukan output di suatu sektor yang dipengaruhi oleh permintaan akhir tiap-tiap sektor perekonomian, maka ukuran ini dapat dimanfaatkan untuk melihat keterkaitan ke depan. Untuk keperluan perbandingan antar sektor, maka persamaan (5) dan (6) perlu dinormalkan dengan cara membagi rata-rata dampak suatu sektor dengan rata-rata dampak seluruh sektor (BPS Provinsi Maluku & BAPPEDA Provinsi Maluku, 2015) sehingga menjadi:

$$\alpha_j = \frac{r_j}{\frac{1}{n} \sum_i \sum_j b_{ij}} \dots\dots\dots(7)$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^n b_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_i \sum_j b_{ij}}$$

$$\beta_i = \frac{r_i}{\frac{1}{n} \sum_i \sum_j b_{ij}} \dots\dots\dots(8)$$

$$= \frac{\sum_{j=1}^n b_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_i \sum_j b_{ij}}$$

Besaran nilai α_j selanjutnya disebut Indeks Daya Penyebaran (IDP) dan β_i disebut Indeks Daya Kepekaan (IDK). Besarnya nilai $\alpha_j > 1$ menunjukkan bahwa daya penyebaran sektor j berada di atas rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi, begitu juga sebaliknya. nilai $\beta_i > 1$ menunjukkan bahwa derajat kepekaan sektor i lebih tinggi dari rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor, begitu juga sebaliknya. Sehingga sektor dengan $IDP > 1$ dan $IDK > 1$ merupakan sektor sektor kunci karena mempunyai keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan yang tinggi.

Analisis Model IRIO

Model IRIO merupakan model yang menggambarkan hubungan ekonomi antar regional, sehingga makin banyak regional yang dianalisis maka akan semakin kompleks. Analisa IRIO mengandung agregasi ganda, produksi tidak hanya diperinci menurut lapangan usaha tetapi juga menurut region. Output suatu region tidak hanya digunakan untuk sektor-sektor produksi di region itu sendiri tetapi juga diekspor ke region lain, input yang digunakan oleh suatu region tidak hanya berasal dari region itu sendiri tetapi juga diimpor dari region lain. Untuk memudahkan kerangka kerja, misalkan terdapat dua daerah dengan R_{ij} adalah matriks teknologi akibat penggunaan input antara pada daerah j dari daerah i , X_i adalah vektor output pada daerah i , dan F_i adalah vektor permintaan akhir pada daerah i . Model interregional input-output dari kasus tersebut adalah sebagai berikut (Hewings, 2020):

$$\begin{bmatrix} R_{11} & : & R_{12} \\ \dots & \dots & \dots \\ R_{21} & : & R_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ \dots \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} F_1 \\ \dots \\ F_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 \\ \dots \\ X_2 \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots(9)$$

Solusi dari persamaan (9) dapat ditampilkan dalam bentuk persamaan (10), dimana B_{11} , B_{12} , B_{21} , dan B_{22} adalah komponen partisi dari matrik kebalikan Leontif.

$$\begin{bmatrix} B_{11} & : & B_{12} \\ \dots & \dots & \dots \\ B_{21} & : & B_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_1 \\ \dots \\ F_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 \\ \dots \\ X_2 \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots(10)$$

Jika kita merinci penyelesaian X_1 , dapat ditampilkan dalam persamaan berikut:

$$X_1 = B_{11}F_1 + B_{12}F_2 \quad \dots\dots\dots(11)$$

$$X_1 \dots\dots\dots(12)$$

$$= [(I - R_{11}) - R_{12}(I - R_{22})^{-1}R_{21}]^{-1}F_1$$

$$= +[(I - R_{11}) - R_{12}(I - R_{22})^{-1}R_{21}]^{-1}R_{21}(I - R_{22})^{-1}F_2$$

Penjelasan bentuk $R_{12}(I - R_{22})^{-1}R_{21}$ adalah matrik R_{21} mengandung pengertian permintaan di sektor regional 2 untuk menghasilkan output disektor 1, permintaan tersebut akan menghasilkan output di regional 2 baik secara langsung atau tidak langsung yang tercermin pada matriks $(I - R_{22})^{-1}$ dimana dalam menghasilkan ouput tersebut juga membutuhkan input dari regional 1 dalam bentuk matrik R_{12} (interregional feedback effects). Kemudian bentuk $R_{21}(I - R_{22})^{-1}F_2$ mengandung pengertian permintaan akhir di regional 2 yang berubah menjadi output di regional 2 dan input di regional 1. Oleh karena itu, total ouput di regional 1 juga bisa diakibatkan oleh permintaan akhir di regional 2.

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik yaitu Tabel Inter-Regional Input Output (IRIO) tahun 2016. Model yang digunakan adalah Input-Output (IO) 17 lapangan usaha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Inter Regional Input Output (IRIO) 34 Provinsi. Transaksi yang digunakan adalah transaksi domestik, sehingga transaksi yang dicatat di tiap-tiap provinsi telah memisahkan komponen ekspor dan impor, baik ekspor-impor antar provinsi maupun ekspor-impor dengan luar negeri. Selanjutnya, penilaian yang digunakan adalah harga produsen, sehingga transaksi yang dicatat masih mengandung pajak atas produk neto dan belum memisahkan campur tangan pemerintah terhadap pajak dan subsidi atas produk.

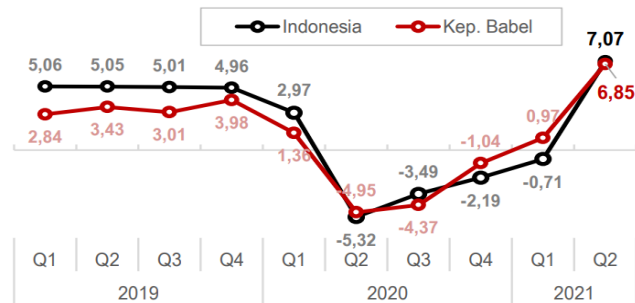
HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,46 juta jiwa, dengan proporsi banyaknya laki-laki dan perempuan hampir sebanding. Kepulauan Bangka Belitung

memiliki luas daratan sebesar 16.424,06 km^2 atau kepadatan penduduk sebesar 89 jiwa/ km^2 . Meskipun share perekonomiannya kecil, yaitu hanya 0,48 persen terhadap PDB, tetapi gini rasio Kepulauan Bangka Belitung (0,256) adalah yang terendah di Indonesia. PDRB Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 adalah sebesar 75,534 triliun rupiah, sehingga PDRB per kapita yang dihasilkan adalah sebesar 49,772 juta rupiah. Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 66,89. Angka ini mengandung arti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, terdapat 66-67 orang penduduk yang merupakan angkatan kerja. Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 adalah sebesar 71,47, capaian IPM di Kepulauan Bangka Belitung tergolong tinggi. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Kepulauan Bangka Belitung pada Maret 2021 sebesar 72,71 ribu jiwa (BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021).

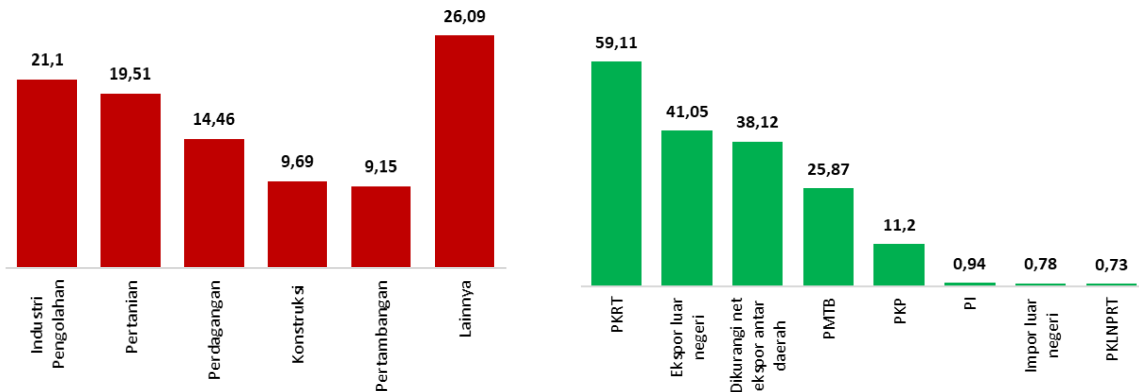
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, pola pergerakan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung sejalan dengan pola pertumbuhan ekonomi nasional (Gambar 1). Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung berada di bawah rata-rata nasional. Sejak adanya pandemi COVID-19 pada triwulan kedua tahun lalu, perekonomian Kepulauan Bangka Belitung juga ikut terdampak. Apabila sebelumnya ekonomi Kepulauan Bangka Belitung konsisten tumbuh sebesar 3 persen (y-on-y), akibat pandemi ini mengalami kontraksi selama beberapa triwulan. Keadaan ini terus mengalami perbaikan, hingga dapat tumbuh sebesar 6,85 persen pada triwulan II 2021 (y-on-y) (BPS, 2021). Meski demikian, perekonomian Kepulauan Bangka Belitung masih belum pulih seperti semula.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, 2019-2021.



Sumber: Rilis BRS BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan II 2021

Gambar 2. Struktur Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung, Triwulan II/2021 (persen):
(a) Lapangan Usaha, (b) Pengeluaran.



Sumber: Rilis BRS BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan II 2021

Jika dilihat dari sisi lapangan usaha, perekonomian Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 21,10 persen (Gambar 2a). Sementara itu, dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar di perekonomian Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 59,11 persen (Gambar 2b). Selain itu, transaksi ekspor luar negeri di Kepulauan Bangka Belitung juga cukup tinggi, yaitu sebesar 41,05 persen, jauh lebih tinggi daripada persentase impornya. Perkembangan ekspor dan impor di Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan yang bervariasi tiap triwulannya. Kepulauan Bangka Belitung merupakan net eksportir, dimana nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan nilai impor. Pada tahun 2020, komoditas ekspor utama Kepulauan Bangka Belitung adalah logam timah dengan kontribusi mencapai 79,75 persen.

Untuk mewujudkan Kepulauan Bangka Belitung Sejahtera, sektor-sektor potensial yang mampu mendorong peningkatan kue ekonomi Kepulauan Bangka Belitung perlu diperhatikan. Selain itu, perlunya mencermati komoditas apa saja yang potensial ekspor, dan juga melakukan diversifikasi produk industri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Dengan begitu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menjadi lebih mandiri dengan tidak bergantung kepada daerah lain. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan tools untuk merumuskan kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan, salah satunya yaitu Tabel Inter-Regional Input Output (IRIO). Tabel IRIO mampu memberikan informasi mengenai struktur ketergantungan sektoral (sectoral interdependency) maupun ketergantungan antarwilayah (regional interdependency).

Tabel 1. Struktur penyediaan dan permintaan Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016.

Penggunaan		Sumber	
Deskripsi	%	Deskripsi	%
Permintaan antara	31,91	Output domestik	79,32
Konsumsi rumah tangga	25,54	Impor	20,68
Ekspor	23,48		
PMTB	12,83		
Konsumsi pemerintah	5,32		
Konsumsi LNPRT	0,61		
Perubahan inventori	0,32		
Total	100	Total	100

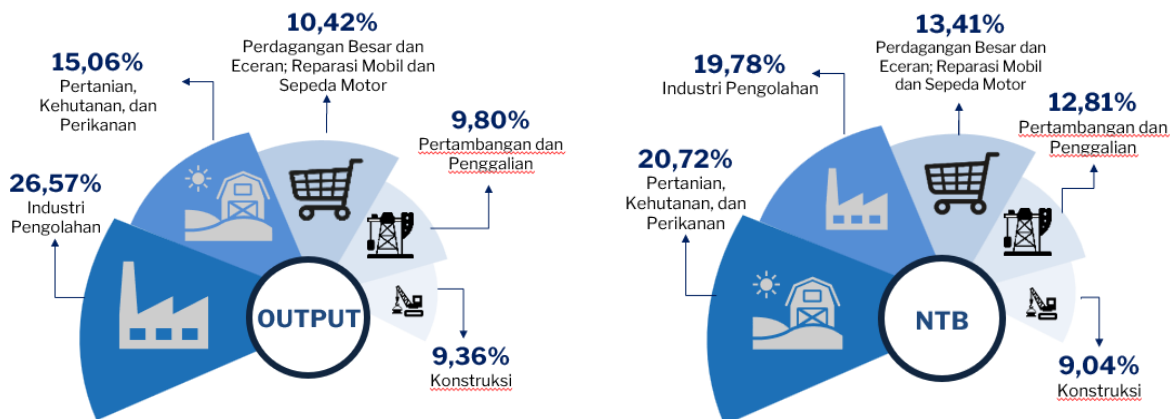
Sumber: Tabel IO Kepulauan Bangka Belitung (diolah)

Dari hasil penghitungan IRIO, terdapat beberapa temuan penting terkait perekonomian Kepulauan Bangka Belitung. Tabel 1 menyajikan neraca penyediaan dan penggunaan barang dan jasa dalam perekonomian Kepulauan Bangka Belitung. Dari Tabel 1 bisa diperoleh informasi mengenai asal barang dan jasa di Kepulauan Bangka Belitung serta alokasi penggunaannya. Total penyediaan dan penggunaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 adalah sebesar 138,02 triliun rupiah. Dari sisi penyediaan, output domestik mendominasi sebesar 79,32%, sedangkan sisanya berasal dari impor. Sementara itu, dari sisi permintaan, didominasi oleh permintaan antara (31,91%) dan konsumsi rumah tangga (25,54%), sedangkan sisanya disumbang oleh ekspor, PMTB, konsumsi pemerintah,

konsumsi lembaga non-profit rumah tangga (LNPRT), dan perubahan inventori.

Jika dilihat dari outputnya, kontributor output domestik terbesar adalah Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Gambar 3a). Industri logam dasar sebagai bagian dari Industri Pengolahan memiliki share ekonomi terbesar yaitu sebesar 14,37%. Kemudian diikuti oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan; Pertambangan dan Penggalian; serta Konstruksi. Kelima lapangan usaha tersebut berkontribusi sebesar 71,21 persen terhadap perekonomian Kepulauan Bangka Belitung. Dari sisi nilai tambah, terdapat sedikit perbedaan dari struktur outputnya (Gambar 3b). Berdasarkan struktur nilai tambah terlihat kontributor terbesarnya adalah Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kemudian diikuti oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan; Perdagangan; Pertambangan dan Penggalian; serta Konstruksi. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang cukup besar dikarenakan Kepulauan Bangka Belitung memiliki banyak potensi dalam mineral bijih timah dan bahan galian yang tersebar merata, antara lain pasir kuarsa, pasir bangunan, kaolin, batu gunung, tanah liat dan granit. Provinsi ini dikenal sebagai penghasil timah putih (stanum) di pasar internasional dengan merk dagang BANGKA TIN. Penambangannya sebagian besar masih diusahakan oleh PT. Tambang Timah, Tbk.

Gambar 3. Struktur: (a) Output, (b) Nilai Tambah Bruto (NTB)



Sumber: Tabel IO Kepulauan Bangka Belitung (diolah)

Gambar 4. Lapangan Usaha Kunci Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2016



Sumber: Tabel IO Kepulauan Bangka Belitung (diolah)

Tabel IO 2016 juga dapat menginformasikan keterkaitan antar lapangan usaha, baik keterkaitan ke belakang maupun keterkaitan ke depan, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi lapangan usaha kunci atau industri unggulan. Analisis tersebut dapat dihasilkan melalui ukuran Indeks Daya Penyebaran (IDP) dan Indeks Daya Kepekaan (IDK) yang nilainya lebih dari satu. Gambar 4 menyajikan plot kuadran berdasarkan IDP dan IDK untuk tiap-tiap kategori lapangan usaha. Jika dipetakan berdasarkan 17 kategori lapangan usaha, Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, serta Transportasi dan Pergudangan merupakan industri unggulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, industri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penciptaan nilai tambah Kepulauan Bangka Belitung masih

termasuk dalam industri potensial.

Lebih jauh, tabel IRIO dapat menyajikan mitra dagang utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menurut wilayah dan provinsi. Secara umum, transaksi dalam wilayah lebih besar daripada transaksi antar wilayah (Tabel 2). Nilai transaksi dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 77,91 triliun rupiah. Sementara itu, transaksi antar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbesar adalah ekspor ke luar negeri sebesar 16,59 triliun rupiah dan transaksi dengan Pulau Jawa (ke Pulau Jawa sebesar 11,69 triliun rupiah dan dari Pulau Jawa 14,43 triliun rupiah).

Tabel 2. Struktur penyediaan dan p`ermintaan Kepulauan Bangka Belitung, tahun 2016.

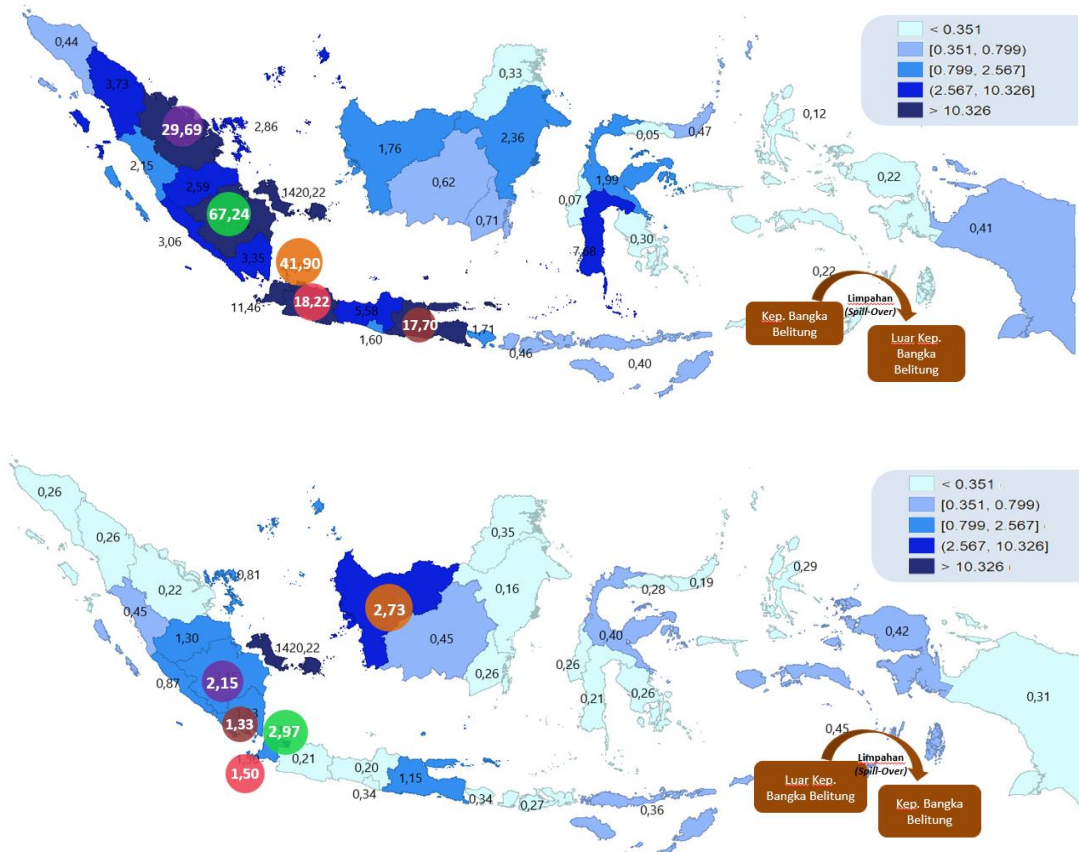
Output	Kep. Babel	Sumatera lainnya	Jawa	Bali & Nusra	Kalimantan	Sulawesi	Maluku & Papua	Ekspor luar negeri	Total Output
Input									
Kep. Babel	77,91	2,53	11,69	0,05	0,57	0,08	0,07	16,59	109,49
Sumatera lainnya	8,74	3616,83	426,07	13,82	26,62	13,66	8,88	568,38	4682,99
Jawa	14,43	605,59	12038,73	174,31	275,19	213,41	100,35	1203,48	14625,50
Bali & Nusra	0,29	12,39	59,14	523,18	8,05	5,46	3,46	95,99	707,96
Kalimantan	0,31	16,67	179,72	10,38	1161,04	36,49	8,80	377,00	1790,40
Sulawesi	0,67	19,49	120,50	18,12	32,69	1021,89	17,64	61,15	1292,15
Maluku & Papua	0,05	12,87	52,04	1,57	2,60	3,33	367,73	56,12	496,30

Sumber: Tabel IRIO Indonesia 2016 (diolah)

Jika dirinci menurut provinsi, maka barang dan jasa yang dihasilkan oleh Provinsi Bangka Belitung tersebut tidak hanya dinikmati di dalam perekonomian domestik saja, tetapi juga di ekspor ke daerah lain. Ekspor terbesar Kepulauan Bangka Belitung adalah ke luar negeri (51,20%), DKI Jakarta (21,96%), Jawa Timur (9,84%), Sumatera Selatan (3,38%), dan Banten (2,99%). Lebih dari setengah ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditujukan untuk luar negeri. Sebagian besar ekspor ini adalah produk-produk Industri Pengolahan. Sementara itu dari sisi impor, impor terbesarnya berasal dari Provinsi Sumatera Selatan (17,69%), DKI Jakarta (16,01%), Jawa Timur (16,22%), luar negeri (14,19%), dan Riau (7,90%). Produk impor terbesar dari Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Riau adalah produk Industri Pengolahan. Jika dilihat dari besaran persentase ekspor dan impor tersebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai hubungan dagang yang lebih intens dengan provinsi

lain di Pulau Jawa dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.

Gambar 5. Keterkaitan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Lainnya.



Sumber: Tabel IRIO Indonesia 2016 (diolah)

Selanjutnya, tabel IRIO dapat menjelaskan bagaimana dampak permintaan akhir di Provinsi Kep. Bangka Belitung terhadap peningkatan output di provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri (intraregional effect) dan menciptakan penambahan output di provinsi-provinsi lainnya (interregional effect). Gambar 5 menunjukkan bagaimana shock permintaan akhir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdampak pada output di provinsi lainnya. Apabila dilihat dari peta sebarannya, maka provinsi yang memperoleh dampak limpahan (spillover effect) tinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Riau, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Perubahan permintaan akhir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

memiliki dampak yang cukup besar terhadap output provinsi-provinsi tersebut. Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi yang mendapat manfaat paling besar ketika terjadi shock permintaan akhir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika terjadi peningkatan dalam permintaan akhir di Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar Rp1.000 maka akan berdampak pada meningkatnya output perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 67,24.

Begitu juga sebaliknya, meningkatnya perekonomian di provinsi lain juga akan menimbulkan dampak limpahan terhadap meningkatnya perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gambar 6 menampilkan dampak output ke provinsi Kepulauan Bangka Belitung akibat shock permintaan akhir di provinsi lainnya. Dampak output ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akibat shock permintaan akhir di provinsi lainnya umumnya memiliki nilai yang cenderung kecil. Adapun provinsi yang paling berpengaruh adalah DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Banten, dan Lampung. Perubahan permintaan akhir di provinsi-provinsi tersebut memberikan limpahan output terbesar terhadap ekonomi Kepulauan Bangka Belitung. Dampak output paling besar ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi ketika ada shock permintaan akhir di Provinsi DKI Jakarta. Jika terjadi peningkatan dalam permintaan akhir di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.000 maka akan berdampak pada meningkatnya output perekonomian di Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar Rp 2,97. Hal yang menarik adalah provinsi-provinsi di Pulau Sumatera pun tidak memberikan dampak yang besar terhadap output di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Lapangan Usaha utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Lapangan Usaha Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan; Pertambangan dan Penggalian; serta Konstruksi dengan total kontribusi sebesar 71,21 persen. Dari sisi keterkaitan antar sektor, maka

Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, serta Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha kunci di Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi ini menunjukkan lapangan usaha utama tidak selalu menjadi lapangan usaha kunci dalam perekonomian. Sementara itu, shock permintaan akhir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga berdampak cukup besar terhadap penambahan output di Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Riau, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Begitu juga sebaliknya, meningkatnya perekonomian di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Banten, dan Lampung cukup berpengaruh dalam menciptakan dampak limpahan terhadap meningkatnya perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan penataan jalur logistik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terintegrasi perlu terus ditingkatkan guna mengembangkan konektivitas perekonomian Kep. Bangka Belitung dengan berbagai wilayah, hal ini sesuai dengan Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni “Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas”. Selain itu, prioritas kebijakan untuk mendukung pengembangan Industri Pengolahan sebagai salah satu industri kunci karena selain memiliki kontribusi besar dalam penciptaan nilai tambah, juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan wilayah lain, sehingga sangat terbuka peluang untuk mengembangkan potensi perdagangan antar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lebih jauh, daya saing lapangan usaha lain sebagai industri potensial terutama pada Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penciptaan nilai tambah tidak kalah penting untuk terus dikembangkan sehingga memperkuat perekonomian Kepulauan Bangka Belitung untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, H., & Nazara, S. (2005). Analisis perubahan struktur ekonomi (economic landscape) dan kebijakan strategi pembangunan Jawa Timur tahun 1994 dan 2000: Analisis input-output. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, *V*(2), 37–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.21002/jepi.v5i2.122>
- BPS, B. (1999). *Kerangka teori dan analisis tabel input-output*. BPS.
- BPS, B. (2021). *Produk Domestik Regional Bruto, 2010-2020*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/52/286/1/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-.html>
- BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2021). *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam angka 2021*. BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. <https://babel.bps.go.id/publication/2021/02/26/0c50488f5da6ac10733d2095/provinsi-kepulauan-bangka-belitung-dalam-angka-2021.html>
- BPS Provinsi Maluku & BAPPEDA Provinsi Maluku. (2015). *Tabel input output Provinsi Maluku 2013*. BPS Provinsi Maluku.
- Daryanto, A., & Hafizrianda, Y. (2010). Analisis input-output & social accounting matrix. *IPB Press*. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/42648>
- Hewings, G. J. D. (2020). *Regional input-output analysis*. Regional Research Institute, West Virginia University. <https://researchrepository.wvu.edu/rri-web-book/10/>
- Luhur, E. S., Saptanto, S., Tajerin, Zamroni, A., & Arthatiani, F. Y. (2014). Analisis konektivitas kelautan dan perikanan antar wilayah pulau utama di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosek KP*, *4*(1), 25–42. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse/article/view/168/983>
- Malba, E., & Iqbal M Taher. (2016). Analisis input-output atas dampak sektor pariwisata terhadap perekonomian Maluku. *Bina Ekonomi*, *20*(2), 213–229. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/be.v20i2.2310.213-229>
- Murbarani, N. (2009). Keterkaitan pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap perekonomian Kota Palembang (input-output analisis). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *7*(1), 37–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.29259/jep.v7i1.4868>
- Nazara, S. (2005). Analisis input-output edisi kedua. In *Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*. https://scholar.google.com/scholar?cites=13906720108610316700&as_sdt=2005&scioldt=0,5&hl=id